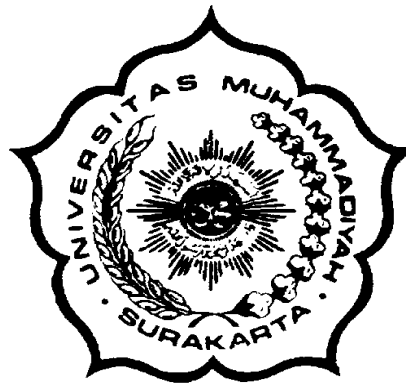


**PERSEPSI MENGENAI IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM  
DAN DEMOKRASI**

**(Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)**



Usulan Penelitian Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Diajukan oleh:

**JATIK IRAWATI**

**A220110126**

Kepada:

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**JULI, 2015**

## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JATIK IRAWATI

NIM : A220110126

Fakultas / Jurusan : FKIP / PPKn

Judul : **PERSEPSI MENGENAI IMPLEMENTASI KONSEP  
NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**

(Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten  
Klaten Tahun 2015)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti artikel publikasi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 1 Juli 2015

Yang membuat pernyataan,



JATIK IRAWATI  
A220110126

**PERSEPSI MENGENAI IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM  
DAN DEMOKRASI**

**(Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)**

Diajukan Oleh:

**JATIK IRAWATI**

**A220110126**

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 1 Juli 2015

Pembimbing



Drs. Achmad Muthali'in, M.Si  
NIK. 406

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MENGENAI IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI (Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)**

**Jatik Irawati, Achmad Muthali'in  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
J4T1k.21@gmail.com**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas datanya dengan triangulasi sumber data dan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitiannya anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang cukup baik dan sesuai dengan teori studi kepustakaan. Terlihat bahwa penjelasan negara hukum adalah negara yang berdasarkan auran hukum, negara demokrasi adalah negara yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Sedangkan, persepsi mengenai implementasi negara hukum menunjukkan pendapat pelaksanaan negara yang berdasarkan aturan hukum telah dijalankan lembaga BPD cukup baik. Dan persepsi mengenai implementasi konsep negara demokrasi menunjukkan pendapat mengenai pelaksanaan mengutamakan kepentingan masyarakatnya telah dijalankan cukup baik.

Kata kunci: Negara Hukum, Negara Demokrasi, Persepsi

Surakarta, 1 Juli 2015  
Penulis

**JATIK IRAWATI**

## **ABSTRACT**

### **PERCEPTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF STATE LAW AND DEMOCRACY**

**(Case Study on Village Consultative Body Member (BPD) Kingkang Village  
Wonosari District of Klaten Regency 2015)**

**Jatik Irawati, Achmad Muthali'in  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
J4T1k.21@gmail.com**

*The purpose of this study was to describe the understanding and perception of the implementation of the concept of rule of law and democracy at the BPD members Kingkang Village Wonosari Subdistrict of Klaten. This study is a qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Validity of data with triangulation of data sources and data collection. Data analysis was performed with an interactive model of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Research subject BPD members Kingkang Village Wonosari subdistrict of Klaten. Results of this study illustrate that the understanding and perception of the implementation of the concept of rule of law and democracy at the BPD members of Kingkang Villange is quite well and in accordance with the theory of literature study. Seen that explanation constitutional state is a state based on law Auran, democratic country is a country that is concerned with the interests of its people. Meanwhile, perceptions regarding the implementation of state law indicates the opinion that the implementation of the country based on the rule of law has run quite well BPD institutions. And perceptions regarding the implementation of the concept of democracy shows opinions on the implementation of the interests of the community have been executed quite well.*

*Keywords: State of Law, Democracy, Perception*

*Surakarta, July 1, 2015  
Author*

**JATIK IRAWATI**

## PENDAHULUAN

Negara hukum dapat artikan, dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan aturan hukum dengan isi menjunjung tinggi hukum. Aturan hukum tertinggi dalam sebuah negara disebut konstitusi atau UUD. Di Indonesia hukum tertinggi berupa UUD 1945. Banyak negara di dunia menerapkan konsep negara hukum baik itu *rechstaats* maupun *rule of law*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep negara hukum. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksudnya negara hukum di Indonesia adalah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Di Indonesia selain berpedoman pada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan juga melaksanakan konsep demokrasi. Secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Rosyada, dkk., 2003:110). Konsep kehidupan demokrasi Indonesia merupakan reduksi dari demokrasi barat yang menekankan pada unsur kebebasan. Namun demikian demokrasi yang diterapkan di Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila yakni adanya musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri berawal dari sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dari bangsa Indonesia yang dikenal di semua daerah di Indonesia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, sehingga tidak salah jika musyawarah menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan hukum juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari hal tersebut mengandung esensi bahwa dalam melaksanakan demokrasi, Indonesia menjalankannya di bawah hukum yang berlaku yakni UUD 1945. Dengan penyelenggaraan pemerin-tah yang berlandaskan hukum serta

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat maka diharapkan terjadi *check and balance* dengan kebebasan serta hak rakyat Indonesia terjamin dan juga mengawasi warga negara agar tidak lalai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Namun kenyataannya, perkembangan hukum dan demokrasi dewasa ini belum menunjukkan konsistensinya, sehingga memicu kekecewaan pada sebagian masyarakat. Banyak gejala-gejala yang menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kemerdekaan berserikat, adanya pemilihan langsung, kebebasan pers dan lainnya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Kasus penyimpangan dalam pelaksanaan konsep negara hukum dan demokrasi banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dan jumpai baik dari berita juga dari kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Persepsi mengenai Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, dengan manfaat untuk mengetahui dan memahami konsep sekaligus implementasi negara hukum dan demokrasi secara baik. Tidak hanya itu, penelitian dengan tema ini jugat erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta baik pada Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, Mata Kuliah Psikologi Sosial, maupun pada Mata Kuliah Sosiologi yang bagian materinya mengenai negara hukum dan demokrasi menjelaskan konsep dari negara hukum dan demokrasi yang seharusnya diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum, sedangkan pada materi psikologi sosial menjelaskan mengenai persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang yang merupakan bagian dari masyarakat di suatu negara. Sedangkan pada Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, diharapkan konsep negara hukum dan demokrasi yang merupakan salah satu materi dasar sebagai upaya perwujudan pemahaman pada teori ketatanegaraan yang di anut oleh negara Indonesia saat ini diserap baik oleh semua orang.

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi serta persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum maupun konsep demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

Untuk memperjelas saat mengumpulkan data yang mengacu dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman konsep negara hukum, pemahaman konsep demokrasi, persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum, dan perspsi mengenai implementasi konsep demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

## **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu terhitung sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode interaktif dengan studi kasus, karena dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus. Selain itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa dalam sistem yaitu persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Selain itu juga penelitian ini menggunakan sumber data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa arsip.

Subjek penelitian ini adalah anggota BPD Ds. Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Obyek penelitian ini adalah persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi dimaksud meliputi bagaimana pemahaman konsep negara hukum, pemahaman konsep demokrasi, persepsi mengenai implementasi konsep negara



hukum, dan persepsi mengenai implementasi konsep demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu narasumber (*informan*), peristiwa, dan dokumen atau arsip. Narasumber atau informan terdiri dari ketua BPD, Sekretaris BPD, dan anggota BPD Desa Kingkang. Peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas anggota BPD dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Klaten, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Nomor I/KPT/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Notulen rapat, Undangan rapat, serta foto kegiatan.

Validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan lainnya. (Moleong 2010:330). Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data, yaitu informan atau narasumber, aktivitas, dan dokumen. Informan atau narasumber, yaitu anggota BPD Desa Kingkang. Serta dokumen yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Klaten, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Nomor I/KPT/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Notulen rapat, Undangan rapat, serta foto kegiatan. Triangulasi teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, berupa tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15-19). Pengumpulan data persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi pelaksanaan dengan cara mengadakan pengamatan pada saat rapat rutin anggota BPD Desa Kingkang atau rapat lainnya yang melibatkan BPD. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan dipilah-pilah secara masalah penelitian. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu analisis sehingga dapat diperoleh gambaran tentang persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi. Berdasarkan gambaran tentang persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum, dengan kata lain semua sendi penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum atau aturan yang berlaku. Dengan menganut sistem negara hukum ini maka penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus dilandaskan aturan hukum tidak terkecuali pada lembaga BPD. BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari, Kab. Klaten telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan konsep negara hukum dengan melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah disah. Misalnya Perda Kab. Klaten No 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan dalam kehidupan demokrasi, lembaga BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten juga telah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan rapat-rapat maupun anggotanya.

Penelitian ini menfokuskan pada pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD. Baik

pemahaman maupun persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dilakukan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut.

- a. Indikator dari pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi terdiri dari: pemahaman mengenai penjaminan hak-hak manusia, pemahaman mengenai pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak, pemahaman mengenai pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan, pemahaman mengenai adanya peradilan administrasi dalam perselisihan, pemahaman mengenai menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, pemahaman mengenai menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, pemahaman mengenai menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, pemahaman mengenai membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, pemahaman mengenai mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan pemahaman mengenai menjamin tegaknya keadilan.
- b. Indikator dari persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi terdiri dari: persepsi mengenai implementasi penjaminan hak-hak manusia, persepsi mengenai implementasi pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak, persepsi mengenai implementasi pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan, persepsi mengenai implementasi adanya peradilan administrasi dalam perselisihan, persepsi mengenai implementasi menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, persepsi mengenai implementasi menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, persepsi mengenai implementasi menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, persepsi mengenai implementasi membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, persepsi mengenai implementasi mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan persepsi mengenai implementasi menjamin tegaknya keadilan.

Hasil penelitian pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa: anggota BPD

Desa Kingkang mampu menjelaskan konsep negara hukum dan demokrasi seperti berikut. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdasarkan aturan hukum, sedangkan pengertian negara demokrasi adalah negara yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Selain itu, anggota BPD Desa Kingkang mampu memberikan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi. Adapun persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum menunjukkan bahwa pendapat pelaksanaan negara yang berdasarkan aturan hukum telah dijalankan lembaga BPD cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan implementasi yang dilakukan BPD yang membuat peraturan tata tertib BPD sesuai dengan Perda Kab. Klaten No. 8 tahun 2006 pasal 36 ayat 1. Sedangkan, persepsi mengenai implementasi konsep negara demokrasi menunjukkan bahwa pendapat mengenai pelaksanaan mengutamakan kepentingan masyarakat desanya telah dijalankan cukup baik. Implementasi negara demokrasi ini sesuai dengan Perda Kab. Klaten No. 8 tahun 2006 Pasal 40 ayat 2. Pelaksanaan demokrasi yang dilakukan BPD Desa Kingkang melalui forum resmi maupun tidak resmi, seperti rapat rutin anggota.

Keterbatasan pada penelitian persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten lebih karena kurangnya dokumentasi yang memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan observasi dan wawancara. Adapun dokumentasi yang kurang memadai antara lain dokumentasi notulen rapat, foto kegiatan, dan Perdes yang mengatur mengenai BPD itu sendiri. Selain keterbatasan dokumentasi, keterbatasan juga terjadi pada pemahaman narasumber. Meskipun sebagian besar narasumber telah memahami konsep negara hukum dan demokrasi dengan baik karena latar pendidikan dan pekerjaannya, namun ada poin pemahaman yang narasumber tidak sesuai dengan teori studi kepustakaan. Misalnya pada poin pemahaman pengadilan administrasi. Di dalam wawancara, ada narasumber yang tidak dapat menjelaskan maksud dari pengadilan administrasi. Hal ini menyebabkan pengutaraan persepsi yang bersangkutan pada implementasi pengadilan administrasi menjadi tidak sesuai dengan konteks yang seharusnya.

## KESIMPULAN

Pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten cukup baik. Dalam mengkaji pemahaman dan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi peneliti menggunakan indikator yang diturunkan dari unsur-unsur negara hukum dan nilai-nilai dari demokrasi. Unsur-unsur negara hukum antara lain penjaminan hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak, pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan, nilai-nilai demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan.

Keterbatasan pada penelitian persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten lebih karena kurangnya dokumentasi yang memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan observasi dan wawancara. Selain itu keterbatasan juga terjadi pada pemahaman narasumber. Sebagian besar narasumber telah memahami konsep negara hukum dan demokrasi dengan baik, namun ada poin pemahaman yang narasumber tidak sesuai dengan teori yang seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Miles, B.Mathew, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UIP.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosyada, dede, dkk., 2003. *Pendidikan Kewargaan (civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan daerah Kabupaten Klaten Klaten No 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.